

Kajian Regulasi Replikasi Pariri Si Desa

Endra Syaifuddin*, Lahmuiddin Zuhri

Universitas Samawa Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

*Penulis Korespondensi : e-mail: endrasyaifuddin@yahoo.com

ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat di era millennial saat ini cenderung besar dengan keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat, namun sayangnya mobilitas warga Negara yang tinggi tidak diimbangi dengan ketepatan dan juga kecepatan pemerintah dalam hal pelayanan kepada publik. Pelayanan publik masih menjadi masalah dalam birokrasi di Indonesia, banyak faktor dan ragam yang menyebabkan hal tersebut menjadi momok di mata masyarakat. Menanggapi fakta-fakta tersebut, maka Kecamatan Lantung menginisiasi sebuah program inovasi bernama PARIRI SI-DESA, singkatan dari PelAyanan sehari terintegrasi Setiap DESA. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dan model Pariri Si Desa di Kecamatan Lantung, serta model Regulasi Replikasi Pariri Si Desa di kecamatan. Selama ini masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik selalu merasakan dipersulit karena sistem birokrasi yang terkesan rumit, misalnya dalam mengurus administrasi kependudukan yang harus bolak balik dari desa ke kecamatan atau sebaliknya, dengan adanya model pelayanan Pariri Si Desa, maka masyarakat di Kecamatan Lantung merasa lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan. jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta penerapannya. Pelayanan Publik yang patut diterapkan di desa atau kecamatan lainnya dengan melihat kondisi geografis dan kesiapan sumber daya aparatur untuk mereplikasikan Pariri SI Desa di tempat lain setidaknya-tidaknya ada empat model yaitu Model Mandiri, Model Kerjasama, Model Fasilitasi dan Model Regulasi. Dari ke empat model tersebut, maka model ke empat yaitu model regulasi adalah konsep baru yang sangat mungkin untuk direplikasikan di daerah lain di seluruh Indonesia. Model keempat inilah yang merupakan hasil temuan dari peneliti.

Kata Kunci : Replikasi, Pelayanan Terintegrasi, Desa, Kecamatan Lantung

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik masih menjadi masalah dalam birokrasi di Indonesia, banyak faktor dan ragam yang menyebabkan hal tersebut menjadi momok di mata masyarakat. Kebutuhan masyarakat di era millennial saat ini cenderung besar dengan keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Kecepatan dan ketepatan ini juga dibutuhkan dalam proses interaksi pemerintah dan warga Negara, namun sayangnya mobilitas warga Negara yang tinggi tidak diimbangi dengan ketepatan dan juga kecepatan pemerintah dalam hal pelayanan khususnya pelayanan kepada publik.

Warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari negara (birokrasi). Warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, dide-ngar suaranya, sekaligus dihargai nilai dan preferensinya. Dengan demikian, warga negara memiliki hak untuk menilai, menolak dan menuntut siapapun yang secara politis bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan publik. Statistik menunjuk-kan bahwa berdasarkan survey indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara nasional 66.4 persen menurut survei Kompas tahun 2016. Angka yang sudah cukup menggembirakan namun perlu upaya peningkatan sebab penilaian masyarakat terhadap pemerintah dari tingkat bawah, seperti pemerintah desa, pemerintah Kecamatan hingga pemerintah Kabupaten dan pemerintah Provinsi juga turut menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Menanggapi pembangunan semua sektor yang bergerak cepat dan bergulir penuh harmoni dalam tantangannya masing-masing, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya menjalankan perannya yaitu jumlah riil desa/ kelurahan Indonesia 83.184, 165 desa/kelurahan di Kabupaten Sumbawa, jumlah yang sangat banyak sebagai kekuatan dan modal membangun serta berdaya dari desa; masih banyak masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan publik; Efektivitas dan efisiensi pelayanan publik masih rendah; masih ada masyarakat yang

merasa termarginalkan dalam mengakses dan merasakan manfaat pembangunan; masih adanya isu pungutan liar dalam pelayanan publik; sentralisasi pelayanan yang masih lebih banyak ke pusat kota/Kabupaten sehingga masih jauh harus ke kota; pemerintah Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten/Kota dinilai masih bekerja pasif, diam di tempat dan tidak proaktif; pemerin-tah desa dinilai masih kurang konsultasi, krisis ide dan inovasi, masih pasif, miskin ide dan gagasan, kalaupun ada maka akan buntu dan terhambat pada pelaksanaan dan eksistensi aplikasi; birokrasi pejabat, sukar ditemui; pemimpin ‘kurang dekat’ dengan masyarakat, tak sesuai dengan semangat saatnya masyarakat merasa memiliki pemerintahnya.

Menanggapi fakta-fakta di atas, maka diperlukan adanya suatu inovasi yang tingkat relevansinya dengan permasalahan serta kemungkinan pelaksanaannya cukup mudah menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kearifan lokal yang ada. Berbekal sebuah usaha pemberdayaan yang berbasis masyarakat dalam kerja tim yang solid dan keterlibatan masyarakat yang partisipatif, sinergitas pemerintah desa, pemerintah kecamatan hingga pemerintah kabupaten dan seterusnya, maka Kecamatan Lantung menginisiasi sebuah program inovasi bernama PARIRI SI-DESA, singkatan dari PelAyanan sehari terintegrasi SetIap DESA.¹

Lantung berbenah merupakan awal dari lahirnya inovasi Parisi Si Desa ini, berbenah merupakan makna yang sama dengan pariri yaitu membenahi yang dianggap kurang baik menjadi ke arah yang lebih baik dalam hal ini adalah pelayan publik. Berhasilnya inovasi Parisi Si Desa ini kemudian dibuktikan dengan menjadi Top 10 pada ajang kompetisi *EnTeBeNovik* pada tahun 2017. Kemudian pada juni tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 25 tahun 2018 tentang penetapan Top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2018 menetapkan Kecamatan Lantung sebagai salah satu TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2018. Pada tahun yang sama berdasarkan Keputusan Menpan RB nomor 636 tahun 2018 tentang penetapan Top 40 inovasi pelayanan publik tahun 2018, maka Kecamatan Lantung ditetapkan menjadi TOP 40 inovasi pelayanan publik tahun 2018 sehingga berhak menjadi daerah percontohan yang menjadi tujuan daerah lain untuk melakukan study banding.³

Pariri Si Desa dinilai berhasil memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Lantung. Tujuan adanya inovasi ini adalah mengubah persepsi masyarakat bahwa pelayanan publik adalah suatu yang sulit dan tidak dekat dengan masyarakat. Adanya program ini mengubah persepsi bahwa pelayanan dapat dilakukan secara berkala dan menyelesaikan berbagai persoalan administrasi atau non administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.⁴Oleh karena itu maka dibutuhkan regulasi yang mengikat agar replikasi Pariri Si Desa di semua desa di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan model Pariri Si Desa di Kecamatan Lantung?
2. Bagaimana model Regulasi Replikasi Parisi Si Desa untuk kecamatan lainnya di Kabupaten Sumbawa?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui konsep dan model Pariri Si Desa di Kecamatan Lantung;
2. Untuk mengetahui model Regulasi Replikasi Parisi Si Desa untuk kecamatan lainnya di Kabupaten Sumbawa.

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Kegiatan penelitian tentang Kajian Regulasi Replikasi Pariri Si Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dari bulan Agustus – Oktober 2019. Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Lantung dan 9 Kecamatan lain yaitu Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Unter Iwes,

¹Wawancara dengan mantan Camat Lantung, Iwan Sofian pada tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 14.32 Wita

²<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/wapres-serahkan-penghargaan-top-40-inovasi-pelayanan-publik-2018>

³<https://indonesiaberinovasi.com/article/read/integrasi-pelayanan-desa-melalui-pariri-si-desa> diunduh pada hari senin tanggal 02 September 2019

⁴*ibid*

Kecamatan Empang, Kecamatan Labangka, Kecamatan Maronge, Kecamatan Lopok, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Alas (Marente) yang saat ini dalam persiapan replikasi.

B. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Sesuai dengan materi kajian dan rumusan masalah, maka jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta penerapannya. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah studi kasus penerapan konsep Pariri Si Desa yang ada di Kecamatan Lantung yang akan direplikasikan di kecamatan lainnya di kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah;
2. Setiap pokok bahasan yang sudah teridentifikasi tersebut, diinventarisasi pula ketentuan-ketentuan hukum normatif yang menjadi tolok ukur terapan;
3. Implementasi pelaksanaan Pariri Si Desa di Kabupaten Sumbawa;
4. Implementasi kesesuaian Konsep Pariri Si Desa terkait regulasi replikasi Pariri Si Desa di Kabupaten Sumbawa.

C. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua jenis sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Data Primer terdiri dari data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi lapangan yaitu di wilayah Kecamatan Lantung, sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum dan kajian kepustakaan dari perundang-undangan dan dokumen hukum.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan data

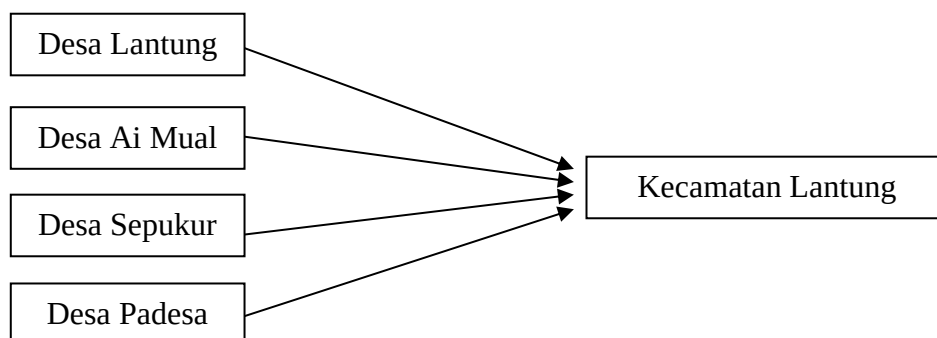
Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengamatan dan wawancara berpatokan terhadap responden yang telah ditentukan. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), dan sistematisasi (*systematizing*) berdasarkan urutan pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Di samping teknik pengumpulan data di atas, maka perlu juga dilakukan observasi terhadap wilayah atau lokasi penelitian.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dan studi dokumen dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka dan dokumen hukum dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan.

E. Analisis Data

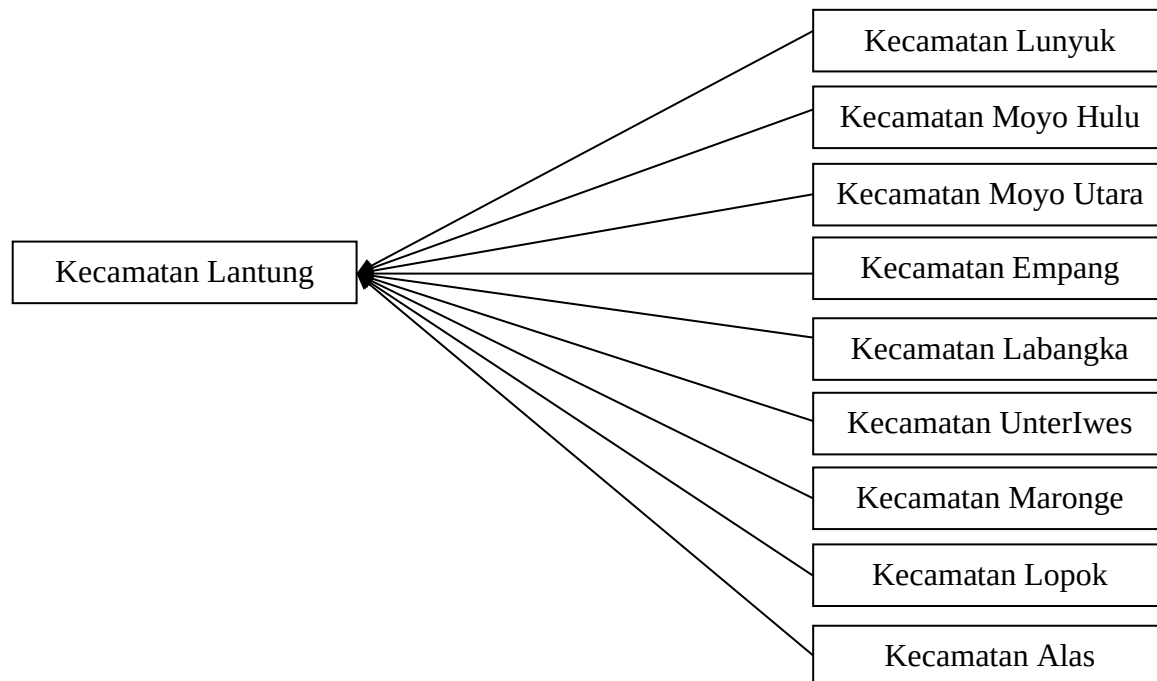
Data data primer dan sekunder hasil pengelolaan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti.

Berikut disajikan alur analisis data secara induktif sebagai berikut :



Gambar 1.1 :
Alur analisis data secara induktif

Berdasarkan gambar di atas, bahwa inovasi ini dimulai dari desa-desa yang ada di kecamatan lantung, kemudian direplikasikan di tingkat kecamatan lantung. Dari keberhasilan inovasi tersebut, maka akan direplikasi ke kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di kabupaten Sumbawa, ini dapat terlihat seperti gambar di bawah ini:



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Model Pariri Si Desa di Kecamatan Lantung

Dalam pelayan publik yang masih menjadi kendala terkait dengan moralitas dan budaya negatif aparatur negara adalah dalam memberikan pelayanan masih adanya pungutan liar, kemudian sentralisasi pelayanan yang masih lebih banyak ke pusat Kabupaten sehingga masih jauh pengurusan ke kota, hal ini perlu menjadi kajian bersama sehingga dalam inovasi membutuhkan pelayanan publik yang bersifat efektif dan efisien. Regulasi saat ini menempatkan pemerintah kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten dinilai masih bekerja pasif, diam di tempat dan tidak proaktif, hal ini ditambah dengan kondisi SDM masyarakat di kabupaten sumbawa khususnya di Kecamatan Lantung masih minim, sehingga jika aparatur negara dalam pelayanan masih pasif, maka pelayanan yang diharapkan tidak akan tercapai, salah satu solusinya adalah pemerintah harus lebih aktif dan jemput bola dalam memberikan pelayanan.

Permasalahan yang masih dirasa cukup menjadi kendala adalah pemerintah desa di nilai masih kurang konsultasi, krisis ide dan inovasi, masih pasif, miskin ide dan gagasan, walaupun ada maka akan buntu dan terhambat pada pelaksanaan dan eksistensi aplikasi, ditambah lagi dengan birokrasi pejabat saat ini masih sukar ditemui. Dari kendala-kendala yang dihadapi selama ini oleh masyarakat termasuk dalam konteks pejabat yang masih sukar ditemui, maka pejabat atau pemimpin yang dibutuhkan atau yang diidamkan oleh masyarakat saat ini adalah pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat, mudah di temui dan yang bersikap humanis. Saat ini masyarakat banyak mengeluh dengan karakter pemimpin yang 'kurang dekat' dengan masyarakat, karena karakter tersebutlah masyarakat menjauh dan acuh tak acuh pada pemerintahan dan proses pembangunan.

Karena alasan adanya "adanya jarak" antara pejabat dengan masyarakat, kemudian masyarakat menganggap bahwa pejabat tersebut digaji oleh negara atau sumber penghasilan pejabat tersebut berasal

dari pajak yang bersumber dari masyarakat, maka dampak dari semua itu bisa terlihat dari setoran pajak yang tidak mencapai target, masyarakat enggan membayar pajak sebab menuding pajak banyak di gunakan oleh pejabat yang tidak humanis, pejabat yang sukar ditemui dan termasuk hasil dari pajak tersebut disalahgunakan atau dikorupsi oleh pejabat-pejabat tertentu, dari kendala-kendala itulah sehingga membutuhkan inovasi baru dalam hal pendekatan dalam upaya menaikkan setoran pajak kepada wajib pajak.

Berangkat dari masalah-masalah di atas, maka inovasi dalam pelayanan publik di Kecamatan Lantung dilakukan dengan berbagai macam pendekatan yaitu integrasi pelayanan terpadu dan komprehensif, mendekatkan kebutu-han masyarakat dan fasilitas yang dibutuhkan sehingga dengan mudah mendapatkan pelayanan publik, kemudian memutus mata rantai birokrasi yang panjang dan rumit. Masyarakat diajak ikut mengambil bagian dengan cara menginven-tarisasi kebutuhan pelayanannya selama satu minggu ke depan, karena dalam seminggu tersebut pemerintah kecamatan menyediakan satu hari kerja untuk melayani masyarakat desa tersebut. Ini dapat berjalan dengan adanya komitmen yang kuat dari semua lini untuk menyukseskan program ini sangatlah tinggi, karena mobilisasi silaturahmi lebih cepat dan tepat dirasakan jika langsung berada dekat dengan masyarakat sebagai sasaran pembangunan yang sesungguhnya. Di samping itu juga masyarakat merasa dimudahkan dengan didekatkannya pelayanan dasar dan pelayanan publik dalam semua aspek pelayanan, meliputi; pendidikan, kesehatan, kepolisian, pelayanan pajak, listrik, air, kehutanan, pertanian, KUA, dan lain-lain.

Hasil yang dicapai atau yang didapatkan sebagai hasil pelaksanaan inovasi pelayan publik yang diberi nama PARIRI SI-DESA di semua desa di wilayah Kecamatan Lantung, antara lain: Sebelum inovasi ini diterapkan penerimaan PBB pada tahun 2016 sebesar 48 persen berada pada urutan ke 17 Kabupaten Sumbawa dan setelah dilaksanakan program ini sejak Januari-September 2017 capaian penerimaan PBB menjadi 95.11 persen berada pada urutan ke 1 Kabupaten Sumbawa, kenaikan yang sangat drastis 100 persen dari sebelumnya hanya dalam kurun waktu singkat, 9 bulan. Menggunakan pendekatan persuasif dengan *door to door* bersama pemerintah desa, pemuka masyarakat dan pendekatan personal juga pendekatan kelompok. Dalam program pemerintah pusat seperti keluarga berencana yaitu capaian akseptor KB pada tahun 2016 hanya 30 %, kemudian setelah inovasi ini dikembangkan menjadi 60 % per September 2017, dimana tahun 2016 KB MKJP (0 khusus MOP) dan per September 2017 menjadi 37 orang MOP termasuk Camat Lantung sebagai peserta pertama di Kecamatan Lantung.

Sebagai upaya agar program pemerintah dapat tercapai dengan baik, maka pemimpin harus menjadi contoh dan menjadi orang pertama dalam melaksanakan program tersebut, sehingga Camat Lantung langsung ditetapkan sebagai Motivator KB Pria (MOP) Tingkat Kabupaten Sumbawa dan juga Camat bersama Ketua TP PKK Kecamatan (Istri Camat) karena camat beserta istrinya turun langsung sosialisasi bersama UPT terkait. Dengan upaya yang telah dilakukan tersebut sehingga menghasilkan Kecamatan Lantung satunya kecamatan yang menggunakan model desa mem-bangun dari tidak ada model sebelumnya menjadi ada model di Kabupaten Sumbawa, seperti Desa Ai Mual menjadi Kampung Pelangi yaitu program cat rumah warna warni yang sangat apik, cantik dan rapi kemudian tanpa sampah berserakan satupun. Ini merupakan salah satu yang menjadi destinasi wisata mendidik bagi semua masyarakat. Di samping itu juga sinergi dengan program KB dalam ikon Kampung KB menjadi Kampung KB Wisata. Kemudian kampung Pelangi Ai Mual juga memanfaatkan pekarangannya dari tanpa rumah yang memanfaatkan pekarangannya menjadi 100 persen rumah sebanyak atau sebanyak 154 KK/ rumah, pemanfaatan pekarangan ini seperti menamakan sayur-mayur di halaman atau pekarangan rumah mereka.

Masyarakat Kecamatan Lan-tung semuanya sepakat dan telah melaksanakan dengan program ini dengan sistem gotong royong dan swadaya dengan catatan pemerintah Desa yaitu dengan APBDes harus membangun jalan dan drainase 100% juga.

Dalam hal inovasi dengan model wisata, maka Desa Lantung menjadi Desa Agro Wisata yaitu dari 0 rumah yang memanfaatkan pekarangan secara optimal menjadi 100 % sebanyak 213 rumah. Selain itu juga terbangunnya Kampung KB Model di Dusun Batu Bela yang dulunya hanya Pra KS angka 89% warganya dan sekarang telah menjadi 47 persen meningkat dengan adanya penghasilan tambahan dari pemanfaatan pekarangan dengan taman Agro Sayuran Organik. Salah satu desa di Kecamatan lantung yaitu Desa Sepukur juga menerapkan hal serupa dengan Desa Lantung sebanyak

315 rumah dari 456 rumah tangga telah menerapkan agro wisata dan kampung pelangi, kampung KB Wisata, 70 %. Selebihnya 30 persen sedang dalam proses pembenahan.

Kecamatan Lantung menjadi Gerakan Kecamatan Mandiri Pangan muncul sejak awal November 2016 dimana hampir seluruh masyarakat Lantung pasti membelanjakan uangnya untuk membeli sayuran maka sejak 3 desa ini konsentrasi memanfaatkan pekarangannya maka ada 315, 154, 132 dengan total 682 rumah dari 903 rumah, 76 % yang ada telah mandiri pangan khususnya sayur dan buah organik. Sedangkan 24 % sisanya sedang dalam proses pembenahan. Dimana sebelumnya pada tahun 2016 belum ada yang memanfaatkan pekarangannya seperti sekarang ini. Pemerintah kecamatan dengan melibatkan UPT Dikbud, Kepala Sekolah, dan komite dalam program ini mampu menurunkan angka DO untuk anak-anak tingkat SMP dari 3 orang di tahun 2016 menjadi 1 orang di tahun 2017 ini, dan 1 orang ini semata-mata karena tidak menginginkan sekolah karena berasal dari keluarga *broken home*. Masyarakat di Kecamatan Lantung dalam mendapatkan pelayanan kesehatan selalu di rumah. Inilah yang menyebabkan pelayanan di puskesmas tidak dilakukan yang mengakibatkan para dokter berlomba-lomba datang ke rumah pasien, sehingga dampak yang parah dari model ini adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga setelah inovasi ini diterapkan maka angka pelayanan kesehatan di rumah juga drastis sekali menurun. Dari 85 persen pasien yang dilayani di rumah oleh tenaga kesehatan, dengan gempuran sosialisasi lewat Pariri Si Desa oleh Kepala Unit Pelayanan Teknis (KUPT) Dinas Kesehatan Kecamatan Lantung dan jajarannya jumlah pasien yang dirawat di Puskesmas 100 persen.

Khusus administrasi pemerintah desa sebelum adanya program ini dari 26 macam buku desa hanya tersedia 8 jenis buku saja namun setelah adanya program ini semua buku desa termasuk buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK) menjadi terisi semua sesuai ketentuan. Dari aspek penyelenggaraan keuangan desa sebelum adanya program ini semua desa bermasalah dalam penyelenggaraan akuntansi ini ditandai dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan juga sampai pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan bahkan ada satu desa diproses hingga Kepolisian dan sejak adanya program ini tidak ada lagi masalah penyelenggaraan pemerintah desa yang bermasalah yang ditangani dan khusus seperti sebelumnya. Dalam bidang wisata inovasi Pariri Si Desa bidang pariwisata sebelumnya semua potensi wisata/ objek wisata seperti Lenang Indah Sepukur mulai mendunia, Lampas Perung, Buin Lajendre di Padesa, Buin Racin di Sepukur, Lampas Babalo di Lantung, Tiu Bangin di Ai Mual dan bahkan Agro Wisata dan Kampung Pelangi menjadi salah satu penggerak roda industri pariwisata Lantung.

Sebelum adanya PARIRI SI-DESA perangkat/ jaringan internet bantuan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang hanya digunakan oleh aktivitas dinas Kantor Camat Lantung saja sedangkan setelah PARIRI SI-DESA akses jaringan internet dibuka untuk umum dengan syarat semua penggunaannya diwajibkan *memposting* masalah potensi pariwisata Lantung dan di Desa Sepukur juga kini telah terpasang jaringan internet desa yang juga bisa diakses masyarakat umum sehingga mampu mendorong publisitas potensi Lantung secara umum. Ada hal yang paling menarik adalah Sebelum PARIRI SI-DESA Kecamatan tidak/ belum membangun informasi berbasis IT termasuk website Lantung; www.keclantung.com dan juga dalam memberikan informasi kemasyarakatan semuanya berbasis online *WhatsApp* Forum Kecamatan, *WhatsApp* Forum Desa, *WhatsApp* Forum Forkopimka, *WhatsApp* sahabat Lantung, *WhatsApp* Peduli Lantung, juga aktif memanfaatkan media sosial yaitu Facebook Kecamatan Lantung, Facebook Destinasi Wisata Lantung, Facebook Kampung Syahdu Lantung, juga beberapa *fanpage* Destinasi Wisata Lantung. Selanjutnya dalam rangka mempercepat akselerasi dan eksplorasi wisata Lantung sudah menggandeng Kampung Media NTB dan nasional hampir setahun dan akan diperpanjang hingga minimal 3 tahun ke depan. Dengan jaringan kampung media mampu menjual potensi Lantung dengan baik.

Dalam rangka program memasyarakatkan gemar agro bagi masyarakat di Kabupaten Sumbawa umumnya kini Kecamatan Lantung telah melakukan inovasi gemar agro tersebut, hal inilah yang membuat Kecamatan Lantung menjadi magnet bagi wilayah lainnya beberapa kecamatan dan desa serta banyak komunitas di Sumbawa untuk berkunjung ke kecamatan Lantung dan melihat perkembangan dan hasil gemar agro tersebut, bahkan dari berbagai desa di NTB, termasuk juga secara nasional dari berbagai kota dan kabupaten datang untuk melakukan study banding dan kunjungan ke kecamatan Lantung.

Kemudian juga beberapa dinas tertentu datang melakukan studi komparatif bagaimana model pemanfaatan pekarangannya. mulai Desa Marente Kecamatan Alas, Desa Jotang Kecamatan Empang, Desa Labangka IV Kecamatan Labangka, Kecamatan Maronge, Kecamatan Lopok, Kecamatan Ropang, Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa, Ikatan Bidan Indonesia, Komunitas Biker (*All Biker*) Nusa Tenggara dan Bali, Wisatawan asing dan manca Negara, dan lain-lain. Hingga kini guna terus mengkampanyekan pemanfaatan pekarangan ini telah menjalin kerja sama dengan PT Prisma Surabaya/ Jakarta dan juga PT Bizi Indonesia. Setiap minggu pagi melakukan road show agro di Taman Mangga Sumbawa Besar, Taman Kerato, Taman Genang Genis dengan melibatkan BUMDes di semua desa dimana sebelum PARIRI SI-DESA belum terbentuk BUMDes di 4 desa dan juga POKDARWIS di semua desa. Kampung KB Dusun Batu Bela sekarang tengah diusulkan menjadi salah satu Kampung KB unggulan nasional oleh BKKBN RI ditandai dengan telah dilakukannya pencaanangan Kampung KB langsung oleh kepala BKKBN RI dan dilaksanakannya wawancara penyusunan buku profil Kampung KB Nasional. Camat Lantung telah ditetapkan sebagai Camat Motivator KB MOP oleh kabupaten Sumbawa pada HARGANAS Tahun 2017 di Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara.

Kecamatan Lantung tengah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi swasta di Sumbawa antara lain tentang riset model pemberdayaan masyarakat dan lembaga pemerintahan kecamatan dan desa; mewujudkan satu desa minimal 1 inovasi dan satu teknologi tepat guna / TTG; kerja sama dari hulu hingga hilir pemasaran bidang agro, riset pembenihan, pembibitan unggul, teknologi kemasan dan hingga pemanfaatan *E-COMMERCE* untuk penjualan produk agro lantung; menjadikan lantung sebagai smart village yang potensial guna meningkatkan layanan publiknya dan juga menguatkan pariwisata berke-lanjutan dan berbasis masyarakat; melatih dan membina masyarakat mandiri dan mampu menjadi pelaku industri pariwisata melalui pelatihan, pendampingan, mewujudkan dan menjadikan rumah masyarakat sebagai basis home stay bagi para tamu dan juga mendorong satu rumah satu produk; melatih dan membina masyarakat terampil dan mandiri membuat pupuk dan pestisida organik dengan pemanfaatan limbah alam dan rumah tangga.

Sebelum PARIRI SI-DESA sering timbul masalah lambannya pelayanan administrasi pemerintahan baik desa maupun kecamatan dan setelah PARIRI SI-DESA maka sudah tidak ada lagi kasus terlambatnya pelayanan administrasi ini walau masih dilakukan secara manual, caranya adalah dengan memberikan kewenangan kepada seluruh jenjang jabatan ASN di sekretariat Kantor Camat Lantung untuk memberikan pelayanan administrasi dimanapun dan kapanpun dibutuhkan, karena masyarakat Lantung 30 persen memiliki rumah di luar lantung yaitu di Kota Kabupaten Sumbawa sehingga Kecamatan Lantung memberlakukan sistem gilir/ piket baik di kantor maupun di luar kantor khusus di Kota Sumbawa Besar/ *mobile* dan seluruh nomor HP pegawai yang piket ini diberikan kewenangan untuk menandatangani administrasi perkantoran.

Kecamatan Lantung juga sedang mengembangkan upaya peningkatan ekonomi berbasis masyarakat dengan industri rumahan yaitu setiap rumah tangga memiliki minimal 1 produk unggulan berbasis ekonomi (*one product one home*) dan dipasarkan melalui marketing yang baik dan jelas. sebelumnya tidak ada upaya memasyarakatkan dan menggerakkan ekonomi produktif masyarakat ini dan yang akan menjadi Mitra usaha masyarakat nantinya adalah BUMDES masing-masing desa, termasuk upaya ini yang kami fasitasi dengan BUMDES adalah bekerjasama dengan salah satu Koperasi di Sumbawa Besar yaitu Pengelolaan Bersama Pengelolaan Madu Hutan Lantung menggunakan mesin Packaging yang langsung menyaring kualitas Madu Hutan ini untuk mengurangi kadar airnya. Uotputnya adalah kemasan madu dalam bentuk Sasetan dan menjadi salah satu produk unggulan Lantung;

Desa identik dekat dengan berbagai pelayanan publik yang kurang memuaskan dan tidak terlayani dengan baik, namun hal ini terjawab oleh salah satu kecamatan di Nusa Tenggara Barat. Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa membuat inovasi untuk pelayanan yang terintegrasi di desa-desa yang berada di Kecamatan Lantung. Konsepnya adalah dalam satu hari dalam seminggu aparat desa bekerja sama dengan pihak kecamatan melayani berbagai keluhan masyarakat secara terintegrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan Camat Lantung, Bapak Iwan Sofian, S.Sos. beliau menjelaskan bahwa:

"Dalam satu hari pelayanan tersebut, pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa dan stakeholder lainnya secara terintegrasi memberikan pelayanan atas berbagai kesulitan yang dihadapi

masyarakat,"⁵

Berbagai pelayanan diantara-nya kesehatan, keluarga berencana, lingkungan hingga pariwisata diberikan kepada masyarakat. Tujuan adanya inovasi ini adalah mengubah persepsi masyarakat bahwa pelayanan publik adalah suatu yang sulit dan tidak dekat dengan masyarakat. Adanya program ini mengubah persepsi bahwa pelayanan dapat dilakukan secara berkala dan menyelesaikan berbagai persoalan administrasi atau non administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.⁶

Faktanya desa memiliki berbagai permasalahan yang cukup kompleks, antara lain: tingkat kepuasan akan pelayanan publik rendah; efektivitas dan efisiensi pelayanan publik masih rendah; masih ada masyarakat yang merasa termarginalkan dalam mengakses dan merasakan manfaat pembangunan; masih adanya isu pungutan liar dalam pelayanan publik; sentralisasi pelayanan yang masih lebih banyak ke pusat kota/ Kabupaten sehingga masih jauh harus ke kota. Pemerintah Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten/ Kota dinilai masih bekerja pasif, diam di tempat dan tidak proaktif.

Kabupaten Sumbawa dengan jumlah desa yang cukup banyak tersebut bisa dijadikan kekuatan dan modal membangun Sumbawa melalui program pemberdayaan desa yang dimiliki dalam proses pengembangan Desa, Lantung (Sumbawa) sebagai salah satu kecamatan di Sumbawa yang memiliki 4 Desa memiliki beberapa isu permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan tata kelola desa sebelum diimplementasikannya program Pariri Si Desa.

Permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Lantung, seperti ; masih banyak masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan publik, masih ada masyarakat yang merasa termarginalkan dalam mengakses dan merasakan manfaat pembangunan, sentralisasi pelayanan yang masih lebih banyak ke pusat kota/Kabupaten sehingga masih jauh harus ke kota, dan pemimpin 'kurang dekat' dengan masyarakat dan tidak sesuai dengan semangat saatnya masyarakat merasa memiliki pemerintahnya. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Lantung merasa perlu adanya suatu inovasi yang relevan terhadap permasalahan dengan memaksimalkan kearifan lokal yang ada. Berbekal sebuah usaha pemberdayaan yang berbasis masyarakat dan keterlibatan masyarakat aktif, sinergitas pemerintah desa, kecamatan hingga pemerintah pusat, maka kami menginisiasi sebuah inovasi bernama PARIRI SIDESA, singkatan dari Pelayanan sehari terintegrasi Setlap DESA.

Selain baru dan belum pernah diterapkan dimanapun, inovasi ini mampu menjawab multidimensional permasalahan secara bersamaan, bersifat fleksibel, dan bisa dimodifikasi lebih hebat. PARIRI SI-DESA singkatan dari Pelayanan sehari terintegrasi Setlap DESA ialah sebuah program berkesinambungan dimana semua pelayanan yang ada di Kecamatan, baik yang dilaksanakan di Kantor Camat maupun di semua Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang ada di wilayah Kecamatan tersebut dilayani di desa/kelurahan. Dengan ketentuan, satu hari satu desa. Camat dan perangkatnya serta masing-masing perwakilan Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan organisasi lain yang berkompeten melaksanakan pelayanan di desa yang telah dijadwalkan tersebut. PARIRI SI-DESA diartikan sebagai kemampuan mengatur dan memperbaiki kondisi masyarakat sesuai kebutuhannya dalam pemenuhan kebutuhan skala prioritas dan jangka waktu singkat, menengah, dan panjang. Hal ini diinisiasi bukan hanya dalam usaha meningkatkan capaian dan kinerja namun juga semangat konkrit untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sedekat mungkin, semudah mungkin, sesingkat mungkin, secepat mungkin, dan sesederhana mungkin.

Selain itu ikatan emosional antar tingkatan pemerintah dengan masyarakatnya akan semakin terjalin, atau dengan bahasa familiar kami sebut *bounding attachment*. Setiap Desa mendapat giliran satu kali seminggu. Seperti di Kecamatan Lantung, terjadwal Desa Lantung, Desa Padesa, Desa Ai Mual, dan Desa Sepukur mendapat giliran satu kali dalam seminggu hari Selasa, hari Jum'at dan hari Senin digunakan oleh Camat untuk mengevaluasi hasil capaian kinerja dan membahas permasalahan-permasalahan yang ada di desa dan kecamatan Selama satu minggu berjalan tersebut. PARIRI SI-DESA memiliki makna secara harfiah, yaitu: Pelayanan: Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Dapat juga berarti aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain tersebut. sehari: satu hari, jam kerja terintegrasi: Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat, dapat juga merupakan proses mengkoordinasikan berbagai tugas, fungsi

⁵Wawancara dengan mantan Camat Lantung, Iwan Sofian pada tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 14.32 Wita

⁶<https://indonesiaberinovasi.com/article/read/integrasi-pelayanan-desa-melalui-pariri-si-desa>

dan bagian-bagian dengan sedemikian rupa dapat bekerja sama dan tidak saling bertentangan dalam pencapaian sasaran dan tujuan di SetIap DESA.

Adapun dampak Pariri Si- Desa selama ± 2 tahun, yaitu: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meningkat 100%, capaian akseptor KB Alat Kontrasepsi jangka panjang(MKJP) meningkat 30% dan Camat langsung ditetapkan sebagai pelopor KB MKJP MOP, penerapan model desa membangun dengan sempurna; Kampung Pelangi; Kampung KB Wisata; QPBDES wajib membangun jalan dan drainase 100%; Desa Agro Wisata; Kampung KB Model; Agro Sayuran Organik; Gerakan Kecamatan Mandiri Pangan, menurunkan angka DO anak sekolah hingga 86%, pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan meningkat hingga 100%, pengadministrasian lebih lengkap, laporan keuangan yang baik dan tidak bermasalah, pengembangan destinasi wisata Lenang Indah Sepukur, Lampas Perung, Buin Lajendre, Buin Racin Lampas Babalo, Tiu Bangin; pengembangan jaringan internet bagi masyarakat luas, website www.keclantung.com dan layanan online lainnya, kerja sama media, kerja sama perusahaan dan PT, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di semua desa, *one product one home*.⁷

Setiap tahapan selalu dijaga konsistensi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ketatnya. *Step by step* program ini terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Jaminan dan dukungan secara struktur, kebijakan, keuangan, dan sistem telah didapatkan dari lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Alokasi dana lebih bersifat pada alokasi tidak langsung seperti pembiayaan program yang memiliki tautan. Dukungan di bidang sosial dan ekonomi juga didapatkan dari lembaga-lembaga non formal lainnya di masyarakat. Dukungan budaya juga ditunjukkan dengan ikutnya berkontribusi LATS (Lembaga Adat Tana Samawa) setempat yang mengambil bagian dalam perannya untuk menangani kebutuhan sosial budaya dan pengembangan seni budaya.

Ada beberapa inovasi yang dilaksanakan di Kecamatan Lantung dalam hal model pelayanan publik karena mengingat luas wilayah lantung; sebaran penduduk lantung; heterogenitas profesi masyarakat lantung; yang mempengaruhi jenis dan model pelayanan, dari data yang kami dapat, bahwasanya warga/ masyarakat antung tidak hanya tinggal di dalam wilayah kecamatan lantung, akan tetapi kurang ada sekitar 17% orang lantung di kota Sumbawa, maka dibuatlah model pelayanan di dalam kota sumbawa yang bertempat di rumah pribadi camat lantung, sehingga warga lantung yang tinggal di kota Sumbawa dapat melakukan seluruh pelayanan publik ke rumah pribadi camat lantung kecuali pelayan kesehatan.

Mayoritas warga lantung adalah petani peternak yang waktu produktif untuk bekerja mencari penghidupan guna pemenuhan kebutuhan ekonomi dari pagi sampai sore hari, maka pelayanan dibuka 24 jam sehari dan tujuh hari pelayanan dalam sepekan atau 24 jam dalam 7 hari pelayanan, karena masyarakat Lantung yang mayoritas petani/ peternak yang rutinitas setiap hari bekerja pergi ke ladang dari setelah Sholat subuh sampai setelah magrib, maka pelayanan di buka pada malam hari. Untuk pelayanan administrasi selain persoalan pertanahan, maka tanda tangan camat boleh digunakan oleh staf kecamatan, karena bentuk mempermudah pelayanan. Camat beserta staf dalam melakukan pelayanan publik selalu membawa stempel (Kantor Berjalan) artinya dimana ada camat dan staf kecamatan disitulah pelayan dilakukan, sehingga pelayanan publik tidak mengenal ruang waktu. Dalam rangka mewujudkan tercapainya inovasi pelayanan publik tersebut, maka ada beberapa pihak yang ikut terlibat dalam inovasi ini yaitu semua *stake holder* yang ada di masyarakat antara lain Pemerintah Desa dan jajaran termasuk Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Pemerintah Kecamatan, UPT Puskesmas, UPT Dikbud (termasuk sekolah yang berada di wilayah setempat), UPT Pertanian, BP3K, UPT KB, KUA, Polisi Sektor (Polsek), Koramil, PKK Kecamatan, PKK Desa, Majelis Taklim, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, LPM, Bumdes, POKDARWIS, LSM, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Wartawan, Media Online.

Berangkat dari keadaan Kecamatan Lantung sebelum dan setelah inovasi pelayanan publik ini dilakukan, maka ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap inovasi ini adalah :

- 1) Masyarakat terlayani sempurna dan paripurna
- 2) Mengetahui, memahami, dan menganalisis permasalahan masyarakat dari jarak dekat dan memungkinkan solusi segera dapat ditemukan dan dilaksanakan

⁷ Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018. KANRB. Jakarta

- 3) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
- 4) Efisiensi, efektivitas, keakuratan, kecepatan, dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat
- 5) Hasilnya dirasakan merata dan cepat, jelas capaian dan waktu yang dibutuhkan sangat singkat
- 6) Memperbesar tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- 7) Memutus mata rantai birokrasi dan pungutan liar yang mengancam.

Mekanisme pelayanan yang dilakukan selama ini dalam menerapkan konsep dan model inovasi Pariri Si Desa yaitu dengan membuat jadwal pelayanan terinteg-rasi sehari setiap desa.

B. Model Regulasi Replikasi Pariri Si Desa untuk kecamatan lainnya di Kabupaten Sumbawa

Replikasi Inovasi adalah proses adopsi atau adaptasi inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan yang ditransfer dari organisasi asal kepada organisasi penerima (replikator). Proses replikasi inovasi melibatkan sedikitnya 1 aktor hingga 3 aktor. Merujuk pada MSI (2012) dan Permenpan No. 30 Tahun 2014 terdapat 3 jenis aktor replikasi inovasi antara lain;

- 1) Instansi Asal (Original Organization); adalah instansi pemerintah tempat inovasi dibangun dan dikembangkan serta telah sukses diterapkan.
- 2) Instansi Penerima (Adopting Organization) atau Instansi Replikator; adalah instansi pemerintah yang melakukan adaptasi praktik inovasi yang telah sukses diterapkan pada instansi/ unit lain.
- 3) Instansi Fasilitator (Intermediary Organization); adalah instansi pemerintah yang menjadi mediator atau fasilitator transfer pengetahuan inovasi di antara instansi asal dengan instansi penerima.

Berdasarkan 3 aktor tersebut proses replikasi inovasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) Model yakni;⁸

1) Model Mandiri

Replikasi inovasi dilakukan secara mandiri oleh instansi penerima (*adopting organization*). Proses replikasi secara mandiri dapat dilaksanakan oleh instansi penerima melalui berbagai metode, antara lain (a) penggalian informasi inovasi dari berbagai buku dokumentasi inovasi, (b) penggalian informasi inovasi dari website, (c) mengikuti pameran inovasi, dan cara lain yang memungkinkan.

2) Model Kerjasama

Replikasi inovasi secara kerjasama dilakukan dengan membuat kerjasama antara instansi asal dengan instansi penerima. Proses replikasi secara kerjasama dapat dilaksanakan melalui beberapa metode, antara lain; (a) bantuan pendampingan instansi asal kepada instansi penerima, dan (b) pemagangan instansi penerima kepada instansi asal, (c) kunjungan lapangan (studi tiru) instansi penerima kepada instansi asal, dan cara-cara lain yang memungkinkan.

3) Model Fasilitasi

Replikasi dilakukan melalui kerjasama antara 3 pihak yakni instansi asal, instansi penerima dan difasilitasi oleh pihak ketiga yakni fasilitator. Proses replikasi secara kerjasama dapat dilaksanakan melalui sebuah acara seperti Forum Replikasi Inovasi. Forum Replikasi Inovasi diselenggarakan oleh instansi fasilitator dengan mempertemukan antara instansi asal dan penerima dalam sebuah acara transfer pengetahuan dan pengalaman melakukan inovasi. Terdapat beberapa metode dalam mengadakan forum replikasi seperti; (a) seminar inovasi, dan (b) coaching clinic antara instansi asal dengan penerima dengan instansi fasilitator, dan (c) website replikasi inovasi

Setelah melakukan serang-kaian kajian yang mendalam dari data dan teori yang ada, peneliti menemukan kekhasan/keunikan yang terdapat pada Kecamatan Lantung, baik keunikan yang dimiliki oleh Camat Lantung (pejabat kecamatan), Staf Kecamatan Lantung maupun masyarakatnya. sehingga kami dihadapkan pada sebuah kesimpulan dan temuan model “Replikasi Inovasi model Regulasi” yang berbeda dengan model replikasi yang suda dikonsepsikan oleh LAN, merujuk pada MSI dan Permenpan RB No 30 Tahun 2014, yang menyatakan proses replikasi inovasi melibatkan sedikitnya satu hingga tiga aktor, antara lain: 1) Instansi asal yang telah sukses; 2) Instansi penerima yang akan melaksanakan adaptasi praktik inovasi; 3) Instansi fasilitator yang menjadi mediator transfer pengetahuan inovasi. Dari

⁸Suripto, dkk. 2003. *Pedoman Replikasi Inovasi*. LAN Press. Jakarta. Hlm. 22

satu sampai tiga aktor tadi lahirlah tiga model replikasi inovasi yaitu model mandiri, model kerjasama dan model fasilitasi.

Menurut peneliti model-model tersebut coba disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Sumbawa, lahirlah model *Replikasi Regulasi* yang memadukan dari ketiga model tersebut, serta diperkuat dengan regulasi atau produk hukum daerah. Ke depan model inovasi PARIRI SI-DESA yang merupakan inovasi pelayanan publik akan direplikasikan di kabupaten Sumbawa, yang mana replikasi akan dikawal dan diarahkan dengan regulasi daerah, yang mana regulasi ini nanti paling tidak mengatur tentang:

1. Inovasi pelayanan publik yang akan direplikasikan.
2. Standar kompetensi aparatur (Camat dan Kepala Desa) sebagai pemimpin wilayah dimana replikasi inovasi diadaptasikan/ dilaksanakan.
3. Karakteristik wilayah kecamatan/ desa sebagai tempat pelaksanaan program inovasi yang akan direplikasikan.
4. Karakteristik dan kesiapan penduduk atau masyarakat yang akan mendukung dan melaksanakan program replikasi inovasi tersebut.

Keunggulan lain yang dimiliki oleh Camat Lantung adalah gaya kepemimpinan, yang mana Camat lebih terlihat menerangkan gaya kepemimpinan transformasional yang didukung oleh kharisma yang dimiliki oleh Camat Lantung, serta label lain yang melekat pada Camat Lantung mulai dari camat yang inspiratif, perhatian dan peduli kepada bawahan (staf dan masyarakat), sehingga kekuatan kepemimpinannya. Hal ini diakui oleh masyarakat lantung dan para staf kecamatan dan desa, sehingga Kecamatan Lantung dalam melakukan sebuah gerakan sosial, pengakuan masyarakat adalah modal yang utama.

Pengembangan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Lantung berbukit-bukit dengan ketinggian 590 meter dari permukaan laut, keadaan ini menyebabkan daerah ini diselimuti embun dan berhawa dingin besar wilayah Kecamatan Lantung berupa hutan belantara yang ditumbuhi berbagai jenis kayu rotan dan semak-semak. Menyebabkan pemukiman penduduk di desa-desa Kecamatan Lantung masih sporadis sehingga sulit dilakukan pelayanan publik secara normal seperti kecamatan lainnya yang lebih urban dan dekat dengan pusat kota. Untuk mengimbangi wilayah yang berbukit dan hutan seperti ini, diperlukan sosok pemimpin (camat) yang tidak hanya peduli dan inovatif tetapi juga dibutuhkan pemimpin yang kuat dan tangguh secara fisik. Karakter fisik Camat Lantung yang merupakan alumni Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) dapat terlihat dari penampilannya, seperti fisik yang kuat, tinggi dan tangguh, sehingga Camat Lantung dapat dengan efektif bekerja dan memiliki kemampuan dalam mengawasi dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Lantung.

Keberhasil inovasi pelayanan publik Pariri Si Desa yang ada di kecamatan Lantung, dapat dijadikan model replikasi di desa atau kecamatan lainnya di Kabupaten Sumbawa, sehingga ke depan lahir regulasi (produk hukum daerah) dapat memperkuat replikasi nanti. Regulasi tentang “Replikasi Pariri Si Desa” secara umum merupakan aturan yang dibuat untuk membantu mengarahkan dan mengendalikan program inovasi, mengendali dan mengarahkan masyarakat dan wilayah tempat inovasi Pariri Si Desa dilaksanakan, serta menjadi pedoman aparatur kecamatan dan desa (Camat dan Kepala Desa) dalam mensukseskan program inovasi yang di adaptasi dari “Replikasi Pariri Si Desa” yang ada di Kecamatan Lantung.

Istilah regulasi ini banyak digunakan dalam segala hal sehingga pengertiannya memang cukup luas, regulasi ini sering digunakan untuk menggambarkan peraturan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Para ahli mengartikan regulasi sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji. Untuk mengartikan regulasi mana yang harus dilihat dulu dalam bentuk atau bidang apa regulasi tersebut digunakan. Regulasi ini banyak diterapkan pada peraturan-peraturan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Bertolak dari kondisi tersebut di atas, maka dalam mewujudkan suatu inovasi, maka harus selalu berhubungan dengan regulasi. Karakter masyarakat yang tidak terlalu mengindahkan sesuatu jika hal tersebut belum diatur dalam bentuk regulasi. Regulasi di Indonesia tentunya ditetapkan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Orang-orang yang memiliki kewenangan inilah yang kemudian disebut sebagai pemimpin.

Pemimpin di desa dan kecamatan seyogianya adalah orang-orang yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat karena kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan

dalam pengembangan dan kemajuan dari sebuah organisasi. Dengan adanya kepemimpinan yang kapabel akan berdampak bagi kemajuan organisasi. Sebab pemimpin sangat diperlukan untuk menentukan tujuan program replikasi, yang berguna untuk sebuah organisasi dan memberi motivasi kepada staf dan masyarakat.

Antusiasme masyarakat dalam program pembangunan dapat dijawab oleh karakter dan gaya kepemimpinan camat dan kepala desa, sehingga pemimpin dapat menggerakkan masyarakat untuk peduli terhadap kondisi yang ada, tentu kepedulian itu lahir dari kondisi marginal menuju kepada kondisi yang ideal. Secara umum untuk membangkitkan partisipasi masyarakat di samping motivasi, karakter dan gaya kepemimpinan seorang pemimpin, maka perlu juga membangun spirit perubahan dari masyarakat, diantaranya membangun rasa tidak puas dengan keadaan atau situasi yang ada sekarang ini, sehingga timbul keinginan untuk mengadakan perbaikan dan saha untuk menyesuaikan diri dengan keperluan keadaan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan perubahan zaman dan pertumbuhan masyarakat. Upaya mengejar ketertinggalan inilah yang akhirnya mendorong adanya perubahan sosial dan motivasi untuk bergerak.

Berangkat dari karakter kepemimpinan di atas, Kecamatan Lantung memiliki modal dalam konteks gaya kepemimpinan camatnya saat itu yaitu Drs. Iwan Sofian, sehingga dengan salah satu semangat dan gaya kepemimpinan itulah Kecamatan Lantung dapat berbenah dengan melakukan berbagai macam inovasi. Inovasi Pariri Si Desa inilah yang akan direplikasikan di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sumbawa. Sifat-sifat itulah yang dimiliki oleh camat Lantung saat itu yaitu Drs. Iwan Sofian. Dalam hal Intelegensia, camat Iwan mampu menangkap keinginan masyarakat Lantung yang butuh sosok pemimpin yang mengayomi dalam pelayanan, kemudian dalam kepribadian juga demikian, camat Iwan di tengah-tengah masyarakat tidak menonjolkan diri sebagai pejabat dan selalu berbaur dengan masyarakat selayaknya sesama masyarakat biasa.

Sebagai alumni IPDN Drs Iwan Sofyan dengan modal karakteristik fisik, maka camat Iwan tidak diragukan lagi, sehingga dalam bekerja sangat energik dan bahkan tidak mengenal lelah, karena memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak kenal ruang dan waktu, bahkan jika para pemuda kecamatan Lantung yang memiliki hobi menjelajahi hutan lantung, camat Iwan pun selalu ikut bersama-sama mereka, karena keuletan tersebut, banyak ditemukan destinasi wisata baru di Kecamatan Lantung seperti Lenang India.

Adapun konsep replikasi dilakukan melalui regulasi yakni pemerintah dalam hal ini pemangku kepentingan dan pemilik kewenangan membuat regulasi yang menjadi acuan untuk mereplikasikan program Pariri Si Desa berupa Peraturan Bupati ataupun peraturan daerah. Proses replikasi melalui regulasi Pariri Si Desa ini dapat dilaksanakan melalui kebijakan kepala daerah yaitu Bupati atau bupati bersama-sama dengan legislatif. Terdapat beberapa metode dalam mengadakan forum replikasi seperti; (a) seminar inovasi, dan (b) coaching clinic antara instansi asal dengan penerima dengan instansi fasilitator, dan (c) website replikasi inovasi.

Tahapan Replikasi Inovasi Model Regulasi tersebut secara umum memiliki 5 tahapan yang diperlukan dalam pelaksanaan replikasi inovasi, yakni ; (a) Regulasi, (b) Persiapan, (c) Rencana Pengembangan Kapasitas, (d) Replikasi, dan (e) Evaluasi. Pada masing-masing fase terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh instansi penerima ketika mereplikasi inovasi dari instansi asal. Adapun penjabaran tahapan-tahapan berikut adalah :

1) Tahapan Regulasi

Pada tahapan Regulasi merupakan tahapan yang paling penting karena merupakan acuan dalam melangkah, tanpa regulasi tahapan-tahapan selanjutnya tidak akan berjalan karena tidak ada acuan kebijakan yaitu Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. Setelah merumuskan kebijakan, maka di dalamnya harus tercantum konsep atau model inovasi tentang karakteristik pemimpin, karakteristik wilayah, karakteristik masyarakat.

Replikasi Regulasi yang memadukan dari ketiga model replikasi yang ada, serta diperkuat dengan regulasi atau produk hukum daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) atau Peraturan Bupati (PERBUB). inovasi PARIRI SI-DESA inovasi pelayanan publik yang akan dituangkan dalam regulasi daerah paling tidak mengatur tentang: *pertama*, Inovasi pelayanan publik yang akan direplikasikan; *kedua*, Standar kompetensi aparatur (Camat dan Kepala Desa) sebagai pemimpin wilayah dimana replikasi inovasi diadaptasikan/ dilaksanakan; *ketiga*, Karakteristik wilayah kecamatan/ desa sebagai tempat pelaksanaan program inovasi yang akan direplikasikan; *keempat*, Karakteristik dan

kesiapan penduduk atau masyarakat yang akan mendukung dan melaksanakan program replikasi inovasi tersebut.

2) Tahap persiapan

Tahap persiapan merupakan proses mengenali karakteristik instansi penerima (*replikator*) dan menilai komptabilitas inovasi. Tahap persiapan terdiri dari beberapa kegiatan yakni;

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang dialami instansi penerima.
- b. Mengenali inovasi, kebaruan dan kompatibilitas.
- c. Mempersiapkan sumberdaya.
- d. Kesepakatan kerjasama antara instansi asal dengan instansi penerima pada model kerjasama dan kesepakatan 3 pihak dalam model fasilitasi. Bentuk kesepakatan tersebut bisa berupa MoU atau berbagai bentuk perjanjian kerjasama lainnya.

3) Tahap Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas

Tahap selanjutnya adalah perencanaan dan pengembangan kapasitas. Pada tahap ini instansi penerima (*replikator*) melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut;

- a. Pembentukan Tim Pelaksana Replikasi Inovasi
- b. Pembuatan Rencana Aksi Replikasi Inovasi
- c. Penguatan kapasitas tim Pelaksana Replikasi Inovasi
- d. Pengembangan Model Inovasi yang direplikasi
- e. Penentuan Model dan Metode Replikasi

4) Tahap Replikasi

Tahap Replikasi merupakan implementasi dari inovasi yang telah melalui tahap persiapan dan perencanaan dan pengembangan kapasitas. Selain itu juga telah dibuat tim pelaksana dan rencana aksi inovasinya. Pada tahap ini terdapat 2 kegiatan yakni;

- a. Pelaksanaan Rencana Aksi.
- b. Monitoring Replikasi

5) Tahap Evaluasi

Tahap Evaluasi adalah akhir dari tahapan replikasi inovasi. Pada tahap ini, Tim Pelaksana Replikasi Inovasi melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi inovasi hasil replikasi dalam jangka waktu yang cukup panjang (misal; 1 atau 2 tahun). Selain itu, Tim Replikasi Inovasi perlu melakukan pengukuran atas manfaat dan dampak yang ditimbulkan selama pelaksanaan inovasi.

SIMPULAN

Inovasi Pariri SI Desa telah mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada di Kecamatan Lantung sehingga kecamatan Lantung menjadi kecamatan model dalam Inovasi bidang Administrasi, Inovasi Layanan terintegrasi, Inovasi kemandirian pangan, Inovasi layanan pendidikan, Inovasi Pelayanan menembus ruang dan waktu, Inovasi karakter memimpin dengan hati, dan Inovasi Kampung KB (Sosialisasi dan Solidaritas). PARIRI SI-DESA singkatan dari Pelayanan sehaRI terintegRasi. Setiap DESA ialah sebuah program berkesinambungan dimana semua pelayanan yang ada di Kecamatan, baik yang dilaksanakan di Kantor Camat maupun di semua UPT yang ada di wilayah Kecamatan tersebut dilayani di desa/kelurahan. Dengan ketentuan, satu hari satu desa. Camat dan perangkatnya serta masing-masing perwakilan UPT dan organisasi lain yang berkompeten melaksanakan pelayanan di desa yang telah dijadwalkan. PARIRI SI-DESA diartikan sebagai kemampuan mengatur dan memperbaiki kondisi masyarakat sesuai kebutuhannya dalam pemenuhan kebutuhan skala prioritas dan jangka waktu singkat, menengah, dan panjang. Model Replikasi Pariri Si Desa merupakan Model Inovasi Pelayanan Publik yang patut diterapkan di desa atau kecamatan lainnya dengan melihat kondisi geografis dan kesiapan sumber daya aparatur untuk mereplikasikan Pariri SI Desa di tempat lain setidaknya-tidaknya ada empat model yaitu Model Mandiri, Model Kerjasama, Model Fasilitasi dan Model Regulasi. Dari ke empat model tersebut, maka model ke empat yaitu model regulasi adalah konsep baru yang sangat mungkin untuk direplikasikan di daerah lain di seluruh Indonesia. Model keempat inilah yang merupakan hasil temuan dari peneliti yang berbeda dengan tiga konsep yang ditawarkan oleh Kemenpan RB berdasarkan Permenpan No. 30 Tahun 2014.

Rekomendasi

- 1) Dalam upaya replikasi konsep dan model Pariri Si Desa yang ada di Kecamatan Lantung yang merupakan Inovasi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa yang dapat direplikasikan secara nasional untuk segera di formulasikan kebijakan daerah (Perbup atau Perda), sehingga dapat segera di replikasikan (diimplementasikan) di kecamatan lain di Kabupaten Sumbawa.
- 2) Ke depan karakteristik pemimpin, karakteristik wilayah, karakteristik penduduk menjadi hal yang utama untuk dilakukan kajian secara mendalam dan pemetaan wilayah guna melihat peluang dari pelaksanaan replikasi konsep dan model inovasi Pariri Si Desa di kecamatan lainnya.
- 3) Seorang pemimpin wilayah kecamatan kedepannya haruslah orang yang benar-benar paham dan memahami kondisi dan potensi wilayah kecamatan tersebut, serta memiliki kepedulian yang tinggi dan daya juang yang tinggi guna melakukan pelayanan kepada masyarakat karena bagaimanapun kecamatan adalah ujung tombak terdepan yang dimiliki aparatur birokrasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 4) Pemimpin wilayah kecamatan harus mampu menggerakkan aparatur birokrasi di kecamatan dan mampu menggugah partisipasi masyarakat untuk peduli terhadap diri sendiri (pengurusan administrasi pribadi) dan lingkungan (guna tercipta desa mandiri yang sehat dan asri), kemudian dalam menempatkan seorang camat yang akan menjadi pemimpin di wilayah kecamatan kepala daerah harus memperhatikan kesesuaian karakteristik dan kapasitas calon camat yang di sesuaikan dengan karakteristik wilayah dan masyarakat yang akan dipimpinya atau yang akan dilayaninya, karena pemimpin wilayah kecamatan adalah perpanjangan tangan kepala daerah dalam pergerakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartono, Kartini. 2006. *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018. Jakarta: KANRB.
- LAN, 2007. *Dimensi Pelayanan Publik Dan Tantangannya Dalam Administrasi Negara (Publik) Di Indonesia*. Jakarta: Bagian Humas dan Publikasi.
- Suripto, dkk. 2003. *Pedoman Replikasi Inovasi*. LAN Press. Jakarta.
- Sutarno. 2012. *Serba-Serbi Manaje-men Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Vontana, Avanti. 2009. *Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai*. Jakarta: Grasindo

Internet :

- <https://indonesiaberinovasi.com/article/read/integrasi-pelayanan-desa-melalui-pariri-si-desa> diunduh pada hari senin tanggal 02 September 2019
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Lantung>, Lantung, Sumbawadiakses pada tanggal 02 September 2019
- <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/wapres-serahkan-penghargaan-top-40-inovasi-pelayanan-publik-2018>